

VANDALISME DAN TINDAKAN KEKERASAN GERAKAN MAHASISWA (STUDI KASUS : HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM)

Vandalism and Action of Student Violence Movement (Case Study: Islamic Students Association)

Fuad Habibi Siregar¹, Pantja Djati², Siswo Pudjiatmoko³

Program Studi Manajemen Pertahanan Universitas Pertahanan

(siregarfuad@yahoo.com)

Abstrak - Gerakan mahasiswa merupakan gerakan sistematis yang digerakkan oleh mahasiswa untuk tujuan menciptakan sebuah perubahan terhadap struktur sosial yang dianggap menciptakan suatu kesenjangan. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) merupakan organisasi kemahasiswaan yang posisinya berada diantara pemerintahan dan rakyat. HMI sebagai penyeimbang antara pemerintah dan rakyat. HMI mendukung segala kebijakan pemerintah yang berpihak pada kepentingan rakyat dan menentang kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat. HMI sebagai salah satu organisasi kemahasiswaan dalam gerakannya seringkali berakhir dengan vandalisme dan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum HMI. Tesis ini berusaha menjawab pandangan organisasi terhadap vandalisme dan tindakan kekerasan, akar penyebab munculnya vandalisme dan tindakan kekerasan, bentuk-bentuk vandalisme dan tindakan kekerasan serta cara aparat keamanan dalam menangani gerakan mahasiswa. Metode penelitian yang digunakan kualitatif dengan studi kasus sebagai desain penelitian. Data dalam penelitian ini didapatkan dari data primer dan sekunder yang selanjutnya dianalisa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keorganisasian vandalisme dan tindakan kekerasan bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di dalam organisasi. Namun secara moral HMI memiliki tanggungjawab terhadap perilaku anggotanya. Vandalisme dan tindakan kekerasan di HMI dilakukan oleh oknum HMI dan mereka bertanggungjawab secara pribadi terhadap perbuatannya. Vandalisme dan tindakan kekerasan yang

¹ Mahasiswa S2 Program Studi Manajemen Pertahanan, Cohort 8, Universitas Pertahanan

² Dosen Universitas Pertahanan

³ Dosen Universitas Pertahanan

dilakukan oleh oknum HMI di pengaruhi oleh faktor budaya masing-masing di cabang organisasi yang berbeda, proses kaderisasi yang belum selesai, faktor individu dan lingkungan anggota HMI serta respon pemerintah terhadap gerakan HMI. Aparat keamanan memiliki prosedur tetap tentang cara penanganan gerakan massa namun seringkali penanganan yang tidak sesuai prosedur dan kondisi lapangan yang selalu berubah berdampak pada vandalisme dan tindakan kekerasan.

Kata Kunci : Gerakan mahasiswa HMI, tindakan kekerasan, vandalisme.

ABSTRACT- Student movement is a movement that is being driven by students for the purpose of creating a change to a unified social structure. Islamic Student Association (HMI) is a student organization whose position is in government and people. HMI as a counterweight between the government and the people. HMI supports all government policies that favor the interests of the people and government decisions that do not side with the interests of the people. HMI as one of the student organizations in its last movement ended with vandalism and acts of violence perpetrated by the HMI. This thesis attempts to write the organization against vandalism and acts of violence, forms of vandalism and acts of violence and the manner of security forces in the student movement. The research method used qualitative with case study as research method. Data in this research is obtained from primary and secondary data which then analyzed. The results show organizational vandalism and acts of violence with values that exist within the organization. But morally HMI has responsibility for the behavior of its members. Vandalism and acts of violence in HMI are done by HMI and they are personally responsible for their actions. Vandalism and acts of violence perpetrated by HMI actors influenced by their respective cultural factors in different branches of the organization, unfinished cadre process, individual and environmental factors of HMI members and the government's response to the HMI movement. The security apparatus has a permanent procedure on the necessary means of non-compliance with ever-changing procedures and conditions on vandalism and acts of violence.

Keywords: HMI student movement, acts of violence, vandalism.

PENDAHULUAN

Beberapa rezim penguasa di dunia tumbang. Tahun 1955 Juan Peron Jimenez di Venezuela, tahun 1966 Soekarno di Indonesia, tahun 1969 Ayub Khan di Pakistan, tahun 1979 Reza Pahlevi di Iran, tahun 1985 Ferdinand Marcos di Filipina, tahun 1987 Chun Doo Hwan di Korea Selatan, tahun 1998 Soeharto di Indonesia.⁴ Rezim penguasa tersebut tumbang diakibatkan munculnya gerakan-gerakan sosial yang bersifat revolusioner ke seluruh lapisan masyarakat yang menentang rezim pemerintahan.

Dalam upaya menjatuhkan rezim kekuasaan selain peran masyarakat secara menyeluruh, peran mahasiswa sebagai kader intelektual memiliki peran yang besar. Gerakan-gerakan mahasiswa menjadi pelopor munculnya gerakan-gerakan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam sebuah negara.

Gerakan yang dimotori oleh mahasiswa berhasil menciptakan perubahan. Hal ini disebabkan karena

gerakan yang mereka merupakan sebuah gerakan yang merepresentasikan kondisi yang sedang terjadi di dalam masyarakat. Gerakan mereka terstruktur, terencana dan matang serta tulus tanpa dipengaruhi kepentingan pihak-pihak tertentu. Tujuan gerakan jelas yaitu menciptakan perubahan yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pada umumnya gerakan mahasiswa lebih terstruktur, terencana dan telah dipersiapkan secara matang dan hal ini yang membedakannya dengan gerakan-gerakan yang lain. Namun tidak jarang juga gerakan-gerakan mahasiswa berubah menjadi gerakan-gerakan yang menimbulkan perilaku-perilaku yang jauh dari norma sosial dan hukum. Vandalisme dan tindakan kekerasan merupakan bentuk tindakan yang tidak sesuai baik secara norma sosial maupun secara hukum yang dilakukan oleh gerakan mahasiswa.

Menurut Lase (2003), vandalisme merupakan tindakan atau perbuatan yang mengganggu atau merusak berbagai obyek fisik dan buatan, baik milik pribadi (private properties) maupun fasilitas atau

⁴ Muhammad Huda Abdunafi, Pandangan Gerakan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Tentang Penerapan Syariat Islam Di Indonesia, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2006), hal.12.

milik umum (public amenities).⁵ Menurut WHO (dalam Bagong. S, dkk, 2000), kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar/trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak.⁶

Perubahan gerakan ini dipengaruhi banyak faktor. Baik yang berasal dari dalam maupun luar gerakan tersebut. Faktor dalam berasal dari individu-individu mahasiswanya yang heterogen baik secara kepribadian yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan, agama, ataupun suku yang berbeda. Ketidakmatangan dalam menyusun rencana gerakan juga merupakan salah satu faktor. Faktor dari luar yaitu adanya kepentingan yang akan menguntungkan pihak-pihak tertentu serta cara pemerintah dalam merespon

gerakan mahasiswa yang tidak sesuai dengan harapan mahasiswa.

Menjadi sangat ironi ketika gerakan yang didasarkan dengan niat yang baik menciptakan sebuah perubahan yang menyeluruh dalam segala aspek berakhir dengan tindakan-tindakan yang justru merusak dan jauh dari tujuan perjuangan yang sesungguhnya.

Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki sejarah panjang dalam upaya mencapai kemerdekaan tidak terlepas dari peran gerakan mahasiswa. Mahasiswa sebagai sosok intelektual yang memiliki pengetahuan yang ditempa oleh pendidikan memiliki pemikiran-pemikiran yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Pendidikan dan kenyataan yang terjadi mengasah jiwa kepedulian mahasiswa untuk bergerak dan menciptakan perubahan. Pendidikan membuat wajah penjajahan terbuka yang sudah tentu menghasilkan penderitaan bagi rakyat dan hal ini tidak dapat didiamkan.

Gerakan-gerakan yang dimotori oleh para mahasiswa dan intelektual memiliki tujuan yang sama yaitu menciptakan sebuah perubahan di Indonesia. Mahasiswa sebagai generasi

⁵ Lase, Pengaruh Lingkungan Keluarga dan Sekolah Terhadap Vandalisme Siswa, (Jakarta: Program Pasca Sarjana FKIP Universitas Indonesia, 2003), hal.36.

⁶ Bagong, S, dkk, *Tindak Kekerasan Mengintai Anak-anak Jatim*, (Surabaya: Lutfansah Mediatama, 2000), hal.27-28.

penyeimbang kekuasaan berada diantara pemerintah dan rakyat. Ia memiliki peran yang sangat besar, dapat sebagai pendukung pemerintah yang berpihak pada rakyat dan tidak jarang juga menjadi penantang kekuasaan pemerintah.

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) sebagai salah satu organisasi kemahasiswaan Islam terbesar dan tertua dalam perjalanan pergerakan mahasiswa di Indonesia memiliki kontribusi yang sangat besar dalam mendukung dan mendorong lahirnya gerakan-gerakan mahasiswa yang memberikan dampak perubahan terhadap masyarakat.

Himpunan Mahasiswa Islam merupakan organisasi yang berasaskan Islam namun tidak bertentangan dengan Pancasila yang didirikan pada tanggal 5 Februari 1947 oleh Lafran Pane.

Himpunan Mahasiswa Islam tidak bertentangan dengan Pancasila dan sangat mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari tujuan awal didirikannya HMI yaitu: Mempertahankan negara RI dan mempertinggi derajat rakyat Indonesia serta menegakkan dan mengembangkan ajaran agama Islam.

Mempertahankan Negara RI adalah tujuan awal didirikannya organisasi ini dan ini mengisyaratkan bahwa sangat besar kecintaan organisasi ini kepada NKRI itu sendiri. Kecintaan yang besar ini diperlihatkan dengan usahanya dalam mempertahankan NKRI dari segala ancaman baik yang berasal dari dalam maupun dari luar.

Kontribusi HMI dalam menciptakan perubahan dapat kita lihat dari gerakan-gerakan mahasiswanya yang masih tetap dijalankan hingga saat ini. Mereka berusaha bermanfaat bagi masyarakat sekitar dan juga menjadi generasi penyeimbang kekuasaan dan hal ini dapat dilihat bahwa tidak jarang selain mendukung program pemerintah yang berpihak pada rakyat mereka juga sering mengkritik pemerintahan disertai dengan solusi-solusinya.

Selain kontribusi dari anggota yang masih aktif, kontribusi ini juga dapat dilihat dari peran para alumni yang masih setia dalam usaha menciptakan perubahan dan hal ini dapat dilihat dari tindakan-tindakan para alumninya sesuai profesi maupun posisi baik di dalam maupun di luar pemerintahan. Alumni HMI diantaranya: Achmad Tirtosudiro (Purnawirawan Jenderal); Taufik

Ismail (Budayawan); Kuntowijoyo (sejarawan UGM); Jusuf Kalla, (Wapres RI); Akbar Tanjung (Mantan Ketua DPR RI); Fahmi Idris (Mantan Menteri Perindustrian); Mahfud MD, (Mantan Ketua MK); Anies Baswedan (Gubernur terpilih DKI); Abraham Samad (Mantan ketua KPK); Harry Azhar Aziz (Ketua BPK), Bagir Manan (Mantan Ketua MA); Syafii Maarif (Mantan ketua Muhammadiyah); Amran Sulaiman (Menteri Pertanian 2014-2019); Bursah Zarnubi (Mantan Ketua Umum PBR);

Dari nama-nama tersebut dapat disimpulkan bahwa HMI telah berhasil melahirkan kader-kader yang bermanfaat di berbagai latarbelakang profesi maupun posisi yang dimiliki para kader tersebut. Alumni HMI berada di berbagai sektor kehidupan mulai dari pemerintahan, budayawan, akademisi maupun yang bergerak langsung di lapisan masyarakat dan lain sebagainya.

Peran HMI terhadap Negara ini sangat besar namun terkadang dalam melakukan sebuah gerakan untuk sebuah perubahan tercoreng oleh vandalisme dan tindakan-tindakan kekerasan.

Perbuatan vandal dan tindakan kekerasan yang dilakukan dalam beberapa aksinya menjadi sangat kontras apabila dilihat dengan latar belakang organisasi yang berasaskan Islam, tidak bertentangan dengan Pancasila dan sangat menjunjung tinggi kedamaian dan kebaikan dalam setiap aksinya yang memiliki tujuan organisasi yaitu : terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdian yang bernafaskan Islam, dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT. Berdasarkan tujuannya tersebut dapat disimpulkan bahwa HMI merupakan organisasi yang mengedepankan cara-cara baik dalam mengutarakan aspirasinya sebagai insan yang akademis yang mengerti agama.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif berkaitan dengan pengembangan atas penjelasan dari fenomena sosial yang terjadi. Fokus dari penelitian kualitatif adalah tentang bagaimana orang-orang dapat memberikan pandangan yang berbeda-beda atas suatu fenomena, serta bagaimana peneliti fokus terhadap

laporan atas hal-hal yang terjadi atau data yang tidak bisa dijabarkan lewat angka.⁷

Penelitian dengan judul “Vandalisme dan tindakan kekerasan gerakan mahasiswa (studi kasus : Himpunan Mahasiswa Islam) ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus sebagai desain penelitian. Penelitian fokus terhadap studi kasus vandalisme dan tindakan kekerasan gerakan mahasiswa dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang dilihat terutama dari sudut pandang Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) sebagai struktur kepemimpinan tertinggi di HMI.

Terdapat dua jenis sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap narasumber yang memiliki kapasitas dibidangnya. Data sekunder diperoleh melalui dokumen-dokumen, buku, jurnal, dan artikel. Data sekunder sebagai data penunjang data primer

yang diperoleh.⁸

Data primer merupakan data informasi yang diberikan dari informan Kabid Perguruan Tinggi Kemahasiswaan dan Pemuda Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PTKP PB HMI), Mantan Ketua Umum PB HMI, Mantan Ketua Umum HMI Cabang Bogor, Mantan oknum pelaku vandalisme dan tindakan kekerasan, Humas Mabes Polri dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat KNPI (Sekjen DPP KNPI). Sedangkan data sekunder merupakan data informasi dari para informan terkait vandalisme dan tindakan kekerasan gerakan mahasiswa (studi kasus: Himpunan Mahasiswa Islam) yang disampaikan dalam berbagai literatur naskah ilmiah, buku, jurnal dan laporan penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara dan dokumentasi sebagaimana pendapat Sujarweni yang mengatakan pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk mengungkap atau menjangkau informasi dari responden sesuai

⁷ B. Hancock, E. Ockleford, & K. Windridge, *An Introduction to Qualitative Research*, The NIHR RDS for The East Midlands, (Nottingham, 2009), hlm.7.

⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hal. 118.

lingkup penelitian.⁹

Teknik wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti akan melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.¹⁰

Metode dokumentasi menurut Hamidi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan.¹¹

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini merujuk pada teknik analisis data yang diperkenalkan oleh Miles dan Huberman yaitu reduksi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing and verification*). Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan

mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan final dapat ditarik dan diverifikasi. Sajian data adalah suatu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan serta memberikan tindakan. Penarikan kesimpulan dan verifikasi dapat dilakukan setelah penulis mengumpulkan, mereduksi, serta menyajikan data. Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari satu kegiatan konfigurasi yang utuh.¹²

PEMBAHASAN

Sejarah HMI

Himpunan Mahasiswa Islam didirikan pada tanggal 5 Februari 1947 di Yogyakarta, Jawa Tengah, Indonesia. Di Universitas Islam di Yogyakarta, Jawa Tengah, atau di Sekolah Tinggi Islam, prakarsa untuk mendirikan HMI tersebut dilakukan oleh beberapa orang mahasiswa yang kemudian menjadi pimpinan-pimpinannya yang

⁹ Sujarweni dan Wiratna, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), hal.73.

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hal.194.

¹¹ Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*, (Malang: UMM Press, 2004), hal.72.

¹² Miles, Huberman, dan Saldana, *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebooks*, (Arizona: SAGE Publications, 2014), hal.18

pertama. Di antara mereka yang terkemuka ialah Lafran Pane, seorang mahasiswa tahun pertama.¹³

Lafran Pane, bersama-sama dengan Kartono, Dahlan Husein, dan Misroh Hilal, semuanya mahasiswa Sekolah Tinggi Islam, akhirnya menyelenggarakan sebuah pertemuan untuk membicarakan bagaimana seharusnya menghadapi tantangan zaman dan menyusun pedoman sebagai penyalur cita-cita para cendekiawan Muslim muda pada ketika itu. Pertemuan yang dipimpin oleh Lafran Pane itu diselenggarakan di sebuah gedung yang sekarang dimiliki oleh Pastoran Katolik Roma di jalan Senopati 30, Yogyakarta. Pertemuan diadakan pada 5 Februari 1947, dalam hari kuliah seperti biasa. Kuliah hari itu mengenai Tafsir Quran yang diberikan oleh Profesor Husein Yahya, dahulu Dekan Jurusan Sastra Arab pada IAIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta. Setelah mendapat persetujuan profesor, Lafran Pane memberikan pernyataan resmi bahwa sebuah organisasi untuk semua mahasiswa Muslim telah didirikan dan bernama Himpunan

Mahasiswa Islam (HMI).¹⁴

Tujuan HMI

Ketika pertama kali didirikan HMI memiliki dua tujuan yaitu :

1. Mempertahankan Negara Republik Indonesia dan mempertinggi derajat rakyat Indonesia.
2. Menegakkan dan mengembangkan ajaran agama Islam.

Seiring perjalanan sejarah, HMI beberapa kali melakukan perubahan terhadap tujuan organisasinya dan hal didasari oleh perkembangan zaman serta situasi dan kondisi pada saat itu. Adapun sekarang tujuan HMI sekarang yang tercantum dalam anggaran dasar HMI Bab III Pasal 4 Tujuan yaitu : Terbinanya Insan Akademis, Pencipta, Pengabdian yang Bernafaskan Islam dan Bertanggungjawab Atas Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur yang Diridhoi Allah Subhanahu Wa Ta'ala.¹⁵

¹³ Agussalim Sitompul, *Historiografi Himpunan Mahasiswa Islam tahun 1947-1993*, (Jakarta: Intermasa, 1995), hal.20

¹⁴ Victor Tanja, *HMI sejarah dan Kedudukannya di Tengah-Tengah Gerakan-gerakan Muslim Pembaharu di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1982), hal.52

¹⁵ Hasil-Hasil Kongres HMI XXIX di Pekanbaru pada tanggal 22 November-5 Desember 2015. hal 74.

Menurut hasil kongres HMI XXIX di Pekanbaru pada tanggal 22 November - 5 Desember 2015, dengan rumusan tujuan HMI, maka pada hakekatnya HMI bukanlah organisasi massa dalam pengertian fisik dan kualitatif, sebaliknya HMI secara kualitatif merupakan lembaga pengabdian dan pengembangan ide, bakat dan potensi yang mendidik, memimpin dan membimbing anggota-anggotanya untuk mencapai tujuan dengan cara-cara perjuangan yang benar dan efektif.¹⁶

Tujuan HMI menggambarkan Kualitas Insan Cita yang diinginkan HMI terwujud di dalam pribadi kader HMI. Menurut hasil kongres HMI XXIX (2015) Kualitas Insan Cita HMI merupakan dunia cita yang terwujud oleh HMI di dalam pribadi seorang manusia yang beriman dan berilmu pengetahuan serta mampu melaksanakan tugas kerja kemanusiaan.

Kualitas Insan Cita sebagaimana dalam pasal tujuan (pasal 5 AD HMI) adalah sebagai berikut :

1. Kualitas Insan Akademis
2. Kualitas Insan Pencipta : Insan Akademis, Pencipta
3. Kualitas Insan Pengabdian : Insan Akademis, Pencipta, Pengabdian
4. Kualitas Insan yang berkeberkahan Islam : Insan Akademis, pencipta dan pengabdian yang berkeberkahan Islam
5. Kualitas Insan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi oleh Allah SWT

Insan cita HMI merupakan “*man of future*” insan pelopor yaitu insan yang berfikir luas dan berpandangan jauh, bersikap terbuka, terampil atau ahli dalam bidangnya, dia sadar apa yang menjadi cita-citanya dan tahu bagaimana mencari ilmu perjuangan untuk secara kooperatif bekerja sesuai dengan yang dicita-citakan. Tipe ideal dari hasil perkaderan HMI adalah “*man of inovator*” (*duta-duta pembaru*). Penyuar “*idea of progress*” insan yang berkeberkahan imbang dan padu, kritis, dinamis, adil dan jujur tidak takabur dan bertaqwa kepada Allah SWT. Mereka itu manusia-manusia yang beriman berilmu dan mampu beramal saleh dalam kualitas yang maksimal (*insan kamil*).¹⁷

¹⁶ Ibid, hal.122.

¹⁷ Ibid, hal 124.

Asas HMI

Dalam anggaran dasar HMI Bab II asas Pasal 3 dikatakan HMI berasaskan Islam. Islam sebagai asas HMI ditafsirkan ke dalam bentuk Nilai Dasar Perjuangan (NDP). Dalam Hasil Kongres HMI XXIX (2015) dituliskan Nilai Dasar Perjuangan terdiri dari beberapa Bab yaitu :

1. Dasar –Dasar Kepercayaan
2. Pengertian-Pengertian Dasar Tentang Kemanusiaan
3. Kemerdekaan Manusia (Ikhtiar) dan Keharusan Universal (Takdir)
4. Ketuhanan Yang Maha Esa dan Perikemanusiaan
5. Individu dan Masyarakat
6. Keadilan Sosial dan Keadilan Ekonomi
7. Kemanusiaan dan Ilmu Pengetahuan
8. Kesimpulan dan Penutup¹⁸

Struktur Organisasi

Struktur organisasi HMI terbagi menjadi 2 yaitu :

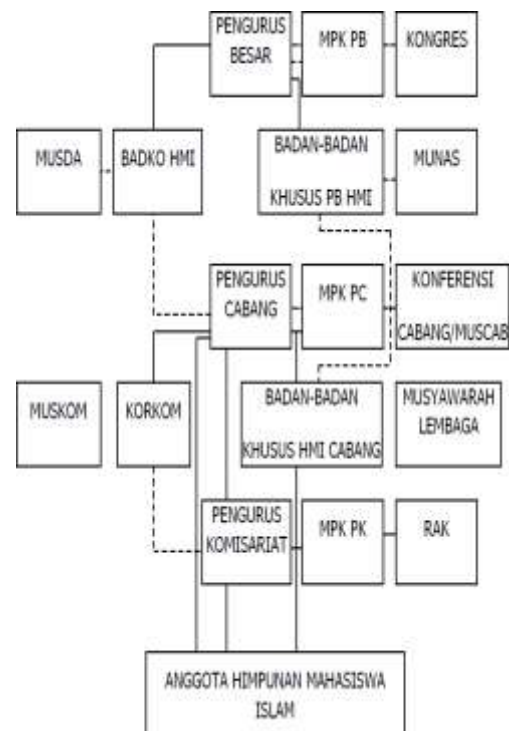
1. Struktur Kekuasaan
2. Struktur Pimpinan

Struktur kekuasaan secara hirarki terdiri dari:

1. Kongres
2. Konferensi/Musyawaharah Cabang
3. Rapat Anggota Komisariat

Sedangkan struktur kepemimpinan secara hirarki terdiri dari:

1. Pengurus Besar HMI
2. Pengurus HMI Cabang
3. Pengurus Komisariat



Gambar 4.1 Struktur Organisasi HMI

Sumber: Buku Konstitusi HMI (2015)

Pandangan HMI Terhadap Vandalisme dan Tindakan Kekerasan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 27 Ayat (3) mengatakan : “Setiap warga negara

¹⁸ Ibid, hal.146

berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara.¹⁹

Bagi HMI pembelaan terhadap negara tidak hanya dilakukan pada saat perang tetapi juga pada masa tenang namun tindakannya lebih kepada upaya membangun bangsa dan negara sehingga tujuan berbangsa dan bernegara yang selama ini dicitakan dapat tercapai.

Segala usaha dan kontribusi HMI dalam membangun bangsa dan negara ini merupakan implementasi nyata dalam upaya mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Ancaman dan gangguan tidak hanya identik dengan perang tetapi lebih luas termasuk ancaman ekonomi, politik, maupun kondisi sosial. HMI berusaha berkontribusi untuk dapat memecahkan persoalan-persoalan ekonomi, politik maupun kondisi sosial yang terjadi.

Berkontribusi adalah salah satu cara bagi HMI untuk membela dan mempertahankan negara. Kontribusi ini

dilakukan melalui tindakan-tindakan positif yang dapat membawa perubahan. HMI berperan sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah yang ingin menciptakan perubahan ke arah yang lebih baik.

HMI berada diantara pemerintah dan masyarakat. HMI mendukung dan membantu pemerintah dalam programnya untuk menciptakan kehidupan masyarakatnya menjadi lebih baik, namun tidak jarang HMI menentang pemerintah apabila dalam membuat kebijakan tidak berpihak kepada rakyat dan justru mementingkan kepentingan individu maupun golongan.

Kegiatan menentang ini tidak jarang berakhir dengan aksi turun ke jalan untuk menyampaikan pendapatnya. Aksi ini seringkali berakhir dengan ricuh dan berujung pada vandalisme dan tindakan kekerasan dan hal ini sangat tidak diinginkan HMI terjadi. Secara keorganisasian HMI tidak membenarkan vandalisme dan tindakan kekerasan. Hal ini diperkuat dengan tidak ditemukannya satu pun hal yang membenarkan perilaku tersebut dalam konstitusi HMI.

Dalam konstitusi organisasi

¹⁹ Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 27 Ayat (3)

di jelaskan secara menyeluruh terkait organisasi. Tujuan HMI menggambarkan 5 kualitas insan cita yang ingin dicapai. Kualitas insan akademis, insan pencipta, insan pengabdian, insan yang bernaftaskan Islam serta insan yang bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi oleh Allah SW.

Dari kualitas tersebut disimpulkan bahwa secara keorganisaasian HMI ingin para kadernya menjadi insan akademis yang mampu mencipta dan melakukan pengabdian yang didasarkan pada nilai-nilai Islam guna mewujudkan kondisi masyarakat yang hidup adil makmur yang tentunya diridhoi Allah SWT.

Vandalisme dan tindakan kekerasan bukan cerminan dari insan akademis yang mampu mencipta dan mengabdikan yang didasari oleh nilai-nilai Islam. Insan akademis yang didasari oleh nilai-nilai Islam selalu mengedepankan keilmuan di dalam setiap tindakan dan perilakunya dan selalu menghindari pemikiran yang sempit dalam memandang sesuatu.

Asas organisasi berupa Islam dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Islam di dalam HMI

ditafsirkan ke dalam bentuk Nilai Dasar Perjuangan yang menjadi patokan bagi organisasi dalam perjuangannya. Dalam nilai dasar perjuangan diajarkan tentang dasar-dasar kepercayaan, dasar-dasar kemanusiaan, kemerdekaan manusia dan keharusan universal, ketuhanan yang maha esa dan perikemanusiaan, individu dan masyarakat, keadilan sosial dan keadilan ekonomi, kemanusiaan dan ilmu pengetahuan.

Dari nilai-nilai ini dapat kita simpulkan bahwa di dalam HMI diajarkan tentang hubungan antara diri kita dengan pribadi sendiri, hubungan diri kita dengan sang Pencipta dan hubungan antara diri kita dengan masyarakat. Ketiga hal ini saling terhubung dan tidak dapat dipisahkan. Inti dari Nilai dasar perjuangan adalah iman, ilmu dan amal.

Sebagai individu kita harus memiliki iman kepada sang pencipta. Menjalankan segala perintah dan menjauhi segala laranganNya. Kita dituntut menjadi pribadi yang berilmu. Mengedepankan keilmuan dalam berperilaku dan bertindak. Iman dan ilmu tidak akan lengkap apabila kita tidak mengamalkannya. Kita dituntut untuk bermanfaat untuk diri sendiri dan masyarakat. Mereka yang mengerti

akan nilai dari NDP tidak akan pernah melakukan vandalisme dan tindakan kekerasan karena itu bertentangan dengan Nilai Dasar Perjuangan HMI.

HMI berasaskan Islam dan tidak bertentangan dengan Pancasila. Nilai-nilai Islam dan Pancasila tidak pernah mengajarkan vandalisme dan tindakan kekerasan. Apabila terdapat satu atau dua orang yang menyimpang di dalam HMI itu bukan menjadi legitimasi untuk mengatakan bahwa ada yang salah di dalam nilai-nilai Islam maupun Pancasila yang diajarkan oleh HMI.

HMI merupakan organisasi yang bersifat independen. Dalam tafsir independensi HMI dikatakan bahwa HMI merupakan organisasi yang bersifat netral. HMI berpihak pada kebenaran baik secara etis maupun secara organisatoris. Independensi HMI tercermin dalam setiap pola pikir dan pola laku kader HMI.

Independensi HMI mengarahkan mereka cenderung kepada kebenaran, bebas terbuka dan merdeka, obyektif rasional dan kritis, progresif dan dinamis, demokratis jujur dan adil. Vandalisme dan tindakan kekerasan terkadang muncul dikarenakan sifat independensi sudah mulai bergeser sehingga arah gerakan

mudah diarahkan atau ditunggangi untuk mencapai suatu kepentingan tertentu.

Mereka yang mengerti akan tafsir independensi HMI akan berupaya sedemikian rupa untuk menghindari vandalisme dan tindakan kekerasan. Kepentingan HMI adalah kepentingan nasional bukan kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.

Sistem perkaderan yang dibentuk di HMI bersifat berjenjang. Sistem perkaderan berfungsi sebagai ruang dalam menyampaikan nilai-nilai di Organisasi. Sistem perkaderan di HMI sangat sistematis. Sistem perkaderan di HMI berupaya untuk menciptakan kepribadian kader yang diistilahkan dengan Muslim Inteligensia.

Istilah Muslim merujuk pada identitas manusia sebagai orang yang menganut agama Islam dengan sempurna (*Kaffah*), yang diikuti oleh pelaksanaan segala kewajibannya sebagai hamba Allah dengan tanpa terkecuali mengaktualisasikan nilai-nilai Ke-Islaman dalam konteks kehidupan berbangsa. Sedangkan istilah Inteligensia merujuk pada sebuah strata sosial dan mengindikasikan “respon kolektif” dari identitas kolektif tertentu, sebagai refleksi dari kesamaan

pendidikan, psiko- sosiografis, sistem nilai, habitus, dan ingatan kolektif yang sama.

Terdapat dua bentuk perkaderan dalam HMI yaitu perkaderan Formal dan perkaderan informal. Dalam Perkaderan formal terdapat 3 jenis Training yaitu Training formal, Training non formal dan Training lainnya. Training formal terdiri dari tiga jenjang yaitu:

1. Latihan Kader 1,
2. Latihan Kader 2 dan
3. Latihan kader 3.

Latihan Kader berfungsi memberikan kemampuan dasar kepada para pesertanya sesuai dengan tujuan dan target pada masing-masing jenjang pelatihan.

Training non formal bertujuan untuk mengembangkan keahlian dan kemampuan di dalam bidang tertentu. Training non formal ini diantaranya:

1. Training Of Trainer (TOT),
2. Training Managemen Training (TMT),
3. Training Instruktur NDP,
4. Training Instruktur Ideopolitorstratak,
5. Training Gender,
6. Sekolah Pimpinan HMI,
7. Kursus Studi Islam (KSI).

Training lainnya merupakan pelatihan diluar training formal dan

non- formal yang dilaksanakan berdasarkan kebutuhan, dan minat kader diantaranya:

1. Latihan Khusus Kohati,
2. Kursus Manajemen,
3. Kursus Bahasa Asing,
4. Training Metodologi Riset,
5. Training Badan Khusus
6. Training Kepemimpinan,
- Manajemen 7. Training Kewirausahaan,
8. training lain yang dianggap perlu.

Perkaderan informal merupakan pelaksanaan perkaderan di luar training, yang dilakukan secara terus-menerus. Perkaderan informal ini menempati porsi yang sangat besar, karena ditinjau dari waktu mengader diri di HMI mencapai lebih dari 95%-nya. Perkaderan informal mencakup hampir seluruh kegiatan perkaderan HMI antara lain meliputi:

1. Follow-Up

Follow-up merupakan aktivitas pasca training yang berfungsi untuk memaksimalkan kemampuan kader sesuai dengan levelnya.

2. Up-Grading

Up-Grading merupakan kegiatan yang menitik beratkan pada pengembangan nalar dan kemampuan kader dalam rangka mempersiapkan

menuju jenjang training berikutnya.

3. Aktivitas

Yang dimaksud dengan aktivitas adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh kader dalam rangka membentuk dan mengembangkan dirinya sehingga menjadi Muslim-Intelegensia (Insan Cita)

4. Promosi

Promosi adalah pendistribusian kader dalam aktivitas struktur organisasi, baik internal ataupun eksternal HMI

5. Coaching/Pendampingan

Coaching/pendampingan adalah aktivitas perkaderan yang dilaksanakan dalam bentuk pembinaan/bimbingan terhadap kader oleh pendamping/pembimbing yang bersifat personal/individu.

6. Pembentukan iklim, suasana dan budaya positif

Pembentukan iklim, suasana, dan budaya positif adalah menciptakan kondisi yang kondusif untuk perkaderan yang selaras dengan prinsip-prinsip perkaderan dalam setiap aktivitas HMI, sehingga para kader nyaman dan dapat mengembangkan potensi dirinya semaksimal mungkin.

7. Kegiatan lain yang dibutuhkan.

Apabila kita perhatikan lebih

lanjut sistem perkaderan di HMI sangat sistematis dan terarah. Dalam Perkaderan Formal, pelatihan yang ada diselenggarakan oleh organisasi. Organisasi yang memfasilitasi kegiatan pelatihan sehingga lebih terarah dan sesuai dengan tujuan HMI. Memiliki materi dan teknis yang jelas dalam melakukan perkaderan. Tetapi yang menjadi kendala merupakan perkaderan yang bersifat informal.

Dalam perkaderan yang bersifat informal ini tidak ada teknis dan materi yang jelas yang disampaikan serta tidak ada pengawasan yang dilakukan oleh organisasi. Perilaku-perilaku yang menyimpang umumnya berasal dari perkaderan informal. Dalam perkaderan informal tidak jelas siapa yang bertugas mengkader. Yang mengkader belum tentu memiliki kapasitas yang baik seperti perkaderan formal. Dalam perkaderan formal untuk menjadi instruktur terdapat pelatihannya.

Dalam perkaderan informal kesempatan atau peluang yang sangat besar muncul bagi pihak-pihak yang memiliki tujuan tertentu untuk menanamkan nilai-nilai sesuai dengan tujuan pribadinya sendiri.

HMI sebagai organisasi secara

moral bertanggung jawab terhadap vandalisme dan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum-oknum HMI. Perilaku tersebut secara tidak langsung mengatakan bahwa HMI telah gagal dalam menanamkan nilai-nilai organisasi kepada para kadernya sehingga perilaku kadernya menyimpang.

HMI memiliki peraturan organisasi yang juga berisi sanksi terhadap mereka yang melanggar nilai-nilai organisasi. Tetapi perbuatan-perbuatan seperti vandalisme dan tindakan kekerasan tidak disebut secara jelas beserta sanksinya. Dalam hal ini HMI terlalu longgar atau cenderung mengacuhkan perilaku-perilaku menyimpang organisasinya. Tidak ada sanksi yang tegas dan upaya organisasi secara serius dalam mengurangi vandalisme dan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum HMI.

Media bagi HMI merupakan suatu sarana penyampai informasi yang sangat strategis di dalam membentuk sebuah opini. Dengan media suatu informasi dapat dengan cepat ditangkap dan diterima oleh khalayak banyak. Hal ini sesuai dengan pendapat Susanto (1980) yang

mengatakan Media massa adalah suatu jenis komunikasi yang ditunjukkan kepada sejumlah khalayak yang tersebar, heterogen, dan anonim melewati media cetak atau elektronik, sehingga pesan informasi yang sama dapat diterima secara serentak dan sesaat.²⁰

Media bagi HMI disamping berperan dalam penyampaian informasi juga bertanggung jawab terhadap stigma terhadap organisasi sehingga seringkali HMI disebut sebagai organisasi garis keras. Media tidak netral dalam melakukan pemberitaan terhadap HMI. HMI memiliki banyak kegiatan yang positif namun perilaku oknum HMI yang menyimpang yang selalu di sorot lebih. Bagi HMI media hanya bisa di lawan dengan media oleh karena itu HMI juga seharusnya menggunakan media sebagai alat untuk menyampaikan kegiatan-kegiatan positif yang dilakukannya sehingga stigma yang selama ini terbentuk dapat terpuaskan.

HMI sebagai organisasi selalu melakukan upaya untuk mengurangi vandalisme dan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum HMI.

²⁰ Susanto, Astrid S, *Komunikasi Massa*, (Jakarta: Binacipta, 1980), hal.2.

Terdapat dua pandangan yang berbeda terkait upaya HMI dalam mengurangi vandalisme dan tindakan kekerasan. Pandangan pertama menganggap sejauh ini tidak ada fokus dari organisasi dalam mengurangi vandalisme dan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum HMI. Hal ini diperkuat dari selama ini bahwa organisasi tidak pernah memberikan sanksi nyata terhadap oknum-oknum HMI ini.

Pandangan yang kedua mengatakan bahwa organisasi telah melakukan berbagai hal dalam upaya mengurangi vandalisme dan tindakan kekerasan tersebut. HMI telah berusaha memperbaiki dan memperbaharui konstitusi HMI disetiap kongres yang diadakan HMI. Perbaikan konstitusi sebagai upaya mencegah vandalisme dan tindakan kekerasan. Melalui perbaikan konstitusi tersebut nilai-nilai HMI selalu diperhatikan dan hasil konstitusi tersebut dapat dibaca dan dijadikan sebagai panduan nilai-nilai yang ada dalam HMI. HMI berupaya memperbaiki sistem perkaderan. HMI juga melakukan fungsi pengawasannya sebagai organisasi dan HMI juga menawarkan cara-cara baru dalam jalannya roda organisasi.

Akar Vandalisme dan Tindakan Kekerasan Gerakan HMI

Basrowi dan Sukidin dalam bukunya yang berjudul Teori-Teori Perlawanan Dan Kekerasan Kolektif menyatakan bahwa gerakan merupakan media dari masyarakat untuk menyampaikan rasa ketidakpuasan sosialnya kepada penguasa. Yang menjadi perhatian dalam pandangan tersebut yaitu terdapatnya ketidakpuasan sosial yang ditujukan kepada penguasa.²¹

HMI sebagai organisasi kemahasiswaan berperan sebagai penyeimbang di dalam kekuasaan. Dalam artian HMI mendukung segala sesuatu kebijakan pemerintah yang mengutamakan kepentingan rakyat namun juga bertindak sebagai pengawas jalannya kebijakan tersebut dan apabila kebijakan tersebut tidak berpihak terhadap kepentingan rakyat dan menimbulkan ketimpangan, HMI merasa memiliki tanggung jawab untuk menyampaikannya kepada pemerintah. Ketimpangan yang dimaksud dapat berupa ketimpangan ekonomi, sosial maupun politik.

²¹ Basrowi dan Sukidin, Teori-Teori Perlawanan Dan Kekerasan Kolektif, (Surabaya: Insan Cendekia, 1999), hal.17.

Hal ini sejalan dengan Menurut Matulesy (2005) yang mengatakan terdapat sebuah teori yang memicu munculnya gerakan mahasiswa yaitu teori Deprivasi kumulatif (Cumulative Deprivation), Deprivasi kumulatif cenderung mencakup ketidakpuasan dalam masalah ekonomi. Artinya ketika seseorang dalam kondisi ekonomi yang miskin menjadi lebih miskin maka akan terjadi ketidakpuasan, yang lama kelamaan akan terakumulasi, sehingga akan lebih mudah mengarahkan individu untuk berpartisipasi dalam gerakan sosial.²²

Gerakan yang dilakukan oleh HMI bukanlah sebuah agenda politik tetapi merupakan sebuah gerakan yang murni yang berpatokan kepada kebenaran sesuai dengan tafsir independensi di dalam HMI yang mengatakan bahwa gerakan HMI cenderung kepada kebenaran bukan dikarenakan kepentingan politik tertentu.

Gerakan HMI merupakan gerakan keorganisasian bukan gerakan individu dan kelompok tertentu.

Gerakan HMI mengangkat isu-isu strategis. Gerakan HMI didasarkan pada suatu tujuan yang dilakukan dengan penuh kesadaran sesuai dengan ideologi yang dipegang teguh oleh HMI. Gerakan yang dilakukan oleh HMI mencerminkan sebuah gerakan kemahasiswaan yang sebenarnya.

Dalam gerakan aksi turun ke jalan untuk berdemonstrasi terkadang gerakan HMI tercoreng dengan aksi vandalisme dan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum-oknum HMI. Vandalisme dan Tindakan kekerasan yang dilakukan sebagai ungkapan kemarahan dikarenakan tidak adanya tanggapan serius dari pemerintah terkait aspirasi yang disampaikan oleh HMI. Hal ini sesuai dengan Kim & Bruchman (2005) yang mengungkapkan bahwa vandalisme adalah penodaan atau perusakan yang menarik perhatian dan dilakukan sebagai ekspresi kemarahan, kreativitas atau keduanya.²³ Perilaku oknum HMI ini juga selaras dengan pandangan Keliat (2002) yang mengatakan perilaku kekerasan merupakan suatu kondisi

²² Matulesy, Mahasiswa dan Gerakan Sosial, (Yogyakarta: Srikandi, 2005), hal.75-76.

²³ Kim, I. & A. Bruchman, *Juvenile Vandalism & Parents Watch: A New Approach Toward the Eradication of the Vandalism phenomena*. (Beit-Berl College, 2005), hal.15.

maladaptif seseorang dalam berespon terhadap marah.²⁴

Faktor yang mempengaruhi para oknum HMI berbuat vandalisme dan tindakan kekerasan yaitu :

1. Budaya masing-masing Cabang

HMI merupakan organisasi kemahasiswaan eksternal kampus yang memiliki 211 cabang dan tersebar di 500 lebih perguruan tinggi di Indonesia. Masing-masing cabang di HMI memiliki budaya-budaya berbeda. Budaya berbeda di sini diartikan lebih kepada warna gerakan yang diusung oleh cabang tersebut.

Budaya masing-masing cabang berpengaruh terhadap perilaku kadernya. Budaya cabang yang dibangun ini berpotensi menimbulkan kader-kader yang melakukan vandalisme dan tindakan kekerasan seperti misalnya dengan HMI Cabang Makassar yang budaya cabangnya identik dengan pergerakan aksi massa. Intensitas aksi ini berpengaruh terhadap peluang munculnya vandalisme dan tindakan kekerasan yang lebih besar.

2. Proses Kaderisasi yang belum selesai

Seorang kader dikatakan telah

benar-benar menjadi kader yang sesungguhnya apabila mengikuti seluruh rangkaian perkaderan yang ada di dalam HMI. Namun yang menjadi kendala yang terjadi tidak semua kader mengikuti seluruh rangkaian perkaderan yang ada sehingga mereka tidak sepenuhnya mengerti akan nilai-nilai yang ada serta tujuan yang sesungguhnya ingin dicapai organisasi. Hal ini membuat terkadang mereka menyimpang dari nilai-nilai yang diajarkan di dalam organisasi dan hal ini yang mendasari munculnya vandalisme dan tindakan kekerasan yang bukan merupakan ajaran di dalam organisasi HMI.

Kaderisasi yang belum selesai membuat kader menerima setengah-setengah dari nilai-nilai organisasi tanpa mengetahui dasar-dasar dan hakikat dari nilai-nilai yang diajarkan sehingga menghasilkan pemahaman yang berbeda dalam merespon segala sesuatu. Pemahaman-pemahaman yang tidak didasarkan pada pengetahuan dan wawasan yang luas membuat kader HMI rentan untuk dimasuki oleh pihak-pihak tertentu. Rentan untuk dipengaruhi untuk melakukan sesuatu hal yang sebenarnya tidak diajarkan di dalam

²⁴ Keliat, A.B.N et all, Proses Keperawatan Jiwa, (Jakarta: EGC,1998).

organisasi. Rentan terhadap masuknya pemahaman-pemahaman menyimpang dan lain sebagainya. Kerentanan inilah yang membuat munculnya vandalisme dan tindakan kekerasan.

3. Faktor Individu

Faktor yang berasal dari dalam diri individu mempunyai peranan dalam memunculkan vandalisme dan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum-oknum HMI. Faktor individu ini diantaranya:

- a. Ekspresi jiwa muda yang keliru yang lebih mementingkan emosi dibanding akal sehat
- b. Vandalisme dan tindakan kekerasan yang dilakukan dengan tujuan mencari perhatian baik pemerintah dan media agar suara pergerakannya didengar.
- c. Vandalisme dan tindakan kekerasan yang dilakukan sebagai eksistensi diri bahwa HMI masih ada
- d. Perasaan utang budi terhadap senior berpengaruh kepada gerakan yang ditampilkan merupakan arahan untuk mencapai tujuan tertentu dari senior.
- e. Masalah pribadi yang dialami oleh oknum-oknum HMI berpengaruh terhadap vandalisme dan tindakan kekerasan yang dilakukan. Masalah pribadi termasuk masalah ekonomi

dan keluarga serta kondisi psikologis oknum HMI.

4. Faktor Lingkungan

Faktor yang berasal dari lingkungan pribadi kader berperan dalam menimbulkan vandalisme dan tindakan kekerasan yang ditampilkan oleh oknum HMI. Faktor Lingkungan yaitu:

- a. Faktor budaya yang berkembang dalam masyarakat. HMI cabang di wilayah timur Indonesia merupakan salah satu wilayah yang seringkali dalam kegiatannya menimbulkan vandalisme dan tindakan kekerasan. Budaya untuk berbicara dengan keras berpengaruh terhadap vandalisme dan tindakan kekerasan yang dilakukan.
- b. Sejarah wilayah yang identik dengan konflik dan tindakan separatisme berpengaruh dalam cara individu dalam merespon sesuatu. Suatu masalah tidak akan selesai tanpa adanya tindakan kekerasan.
- c. Solidaritas diantara kader yang tinggi berpengaruh terhadap perilakunya. Kader merespon terhadap vandalisme dan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kader yang lain.

- d. Doktrinisasi yang salah arah berperan terhadap munculnya vandalisme dan tindakan kekerasan yang dilakukan.
- e. Faktor kepentingan individu maupun kelompok berpengaruh terhadap vandalisme dan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum HMI. Gerakan HMI ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Gerakan HMI diarahkan
- f. Senioritas berpengaruh terhadap perilaku para kader HMI. Senioritas digunakan untuk mengarahkan arah gerakan sesuai dengan kepentingan senior.
- g. Kader HMI tidak mengikuti seluruh rangkaian aksi Perjalanan sebuah aksi dibagi menjadi tiga perjalanan yaitu sebelum aksi, pada saat aksi dan setelah aksi. Sebelum aksi dimulai harus ada persiapan yang matang terkait isu apa yang akan diangkat, data-data terkait isu yang akan diangkat, apa yang akan disampaikan dalam aksi dan semuanya itu harus didiskusikan secara matang sebelum melakukan aksi. Selain itu yang juga akan dipersiapkan adalah teknis di lapangan yang akan dilakukan termasuk dalam hal perijinan kepada pihak yang berwenang. Setelah

persiapan selesai kegiatan selanjutnya yaitu aksi penyampaian pendapat kepada pihak-pihak yang terkait dan selanjutnya setelah aksi selesai harus ada evaluasi kegiatan yang dilakukan, dalam ketiga hal ini tidak semua peserta ikut keseluruhannya. Terdapat juga peserta yang hanya ikut pada saat aksinya saja sehingga wajar jika timbul vandalisme dan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh para oknum ini karena mereka tidak mengetahui teknis di lapangan.

- h. Provokasi baik yang berasal dari kalangan HMI peserta aksi maupun berasal dari luar kalangan HMI yang punya kepentingan dalam gerakan HMI.

Aksi vandalisme dan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum HMI sejalan dengan beberapa motivasi yang mendorong dalam melakukan tindakan vandalisme menurut Cohen (1973) yaitu *Tactical Vandalism*, *Vindictive Vandalism* dan *Play Vandalism*.²⁵

Tactical Vandalism, adalah vandalisme yang dilakukan dengan

²⁵ Cohen, S. Property Destruction: Motives and Meanings. In C. Word (ed.). *Vandalism*. (London: Architectural Press, 1973), hal.70.

motivasi mencapai suatu tujuan. Oknum HMI melakukan vandalisme dan tindakan kekerasan untuk mencapai tujuan baik tujuan organisasi maupun pribadi. Tujuan organisasi yaitu aspirasi di dengarkan oleh pemerintah sedangkan tujuan pribadi dapat berupa kepentingan-kepentingan tertentu. Aksi vandalisme dan tindakan kekerasan ditunggangi kepentingan tertentu. Aksi yang dilakukan merupakan aksi yang dibiayai untuk suatu kepentingan.

Vindictive Vandalism, adalah vandalisme yang dilakukan dengan motivasi untuk membalas dendam atas suatu kesalahan. Salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku vandalisme dan tindakan kekerasan yaitu berasal dari faktor individu. Oknum pelaku memiliki sejarah kelam tentang konflik dan kegiatan separatisme serta memiliki sejarah bentrokan dengan aparat pemerintahan sehingga aksi HMI digunakan untuk membalaskan dendamnya kepada pemerintah.

Play Vandalism, adalah vandalisme yang dilakukan dengan motivasi untuk menunjukkan atau mendemonstrasikan kemampuan yang dia miliki. Kader HMI berasal dari mahasiswa yang dari segi umur dapat dikatakan sebagai pemuda. Sebagai

pemuda cenderung ingin mengekspresikan dirinya demi sebuah eksistensi diri sehingga akhirnya melakukan vandalisme dan tindakan kekerasan sebagai bukti eksistensi dirinya.

5. Respon Pemerintah Terhadap gerakan HMI

Pemerintah tidak memperlakukan dengan baik gerakan HMI. Aksi-aksi HMI tidak disambut secara positif oleh pemerintah. Hal ini berpengaruh terhadap vandalisme dan tindakan kekerasan yang ditampilkan oleh oknum HMI.

Pemerintah melalui aparat keamanan merespon gerakan HMI dengan respon yang refresif sehingga memprovokasi oknum-oknum HMI untuk bereaksi dengan vandalisme dan tindakan kekerasan. Pihak keamanan tidak menjalin komunikasi yang baik dengan peserta aksi sehingga antara pihak keamanan dan pihak aksi tidak memiliki pemahaman yang sama terhadap aksi.

Pihak keamanan dalam merespon tindakan dari peserta aksi seharusnya menyesuaikan dengan kondisi yang sedang terjadi. Dalam gerakan aksi mahasiswa sudah tentu yang melakukan aksi tersebut adalah

pemuda yang secara emosi mudah tersulut. Seharusnya dari pihak keamanan dalam mengamankan aksi tidak dilakukan oleh polisi-polisi muda yang juga mudah tersulut emosinya.

Bentuk Vandalisme dan Tindakan Kekerasan Gerakan HMI

Bentuk kekerasan menurut Galtung (2003) ada tiga yaitu: kekerasan langsung (personal), kekerasan kultural, dan kekerasan struktural dan kekerasan struktural²⁶. Kekerasan langsung adalah sebuah peristiwa; kekerasan struktural adalah sebuah proses; sedangkan kekerasan kultural adalah sebuah sesuatu yang bersifat permanen.

Kekerasan dalam aksi turun ke jalan berdemonstrasi dapat dikatakan sebagai kekerasan langsung, struktural dan kultural. Kekerasan langsung terwujud dalam bentuk perilaku oknum HMI yaitu melakukan pemukulan ataupun penyerangan terhadap pihak keamanan dan pihak keamanan merespon dengan tindakan yang serupa. Kekerasan Struktural disebabkan oleh struktur yang ada.

Pemerintah gagal dalam mencapai tujuan nasional sehingga menghasilkan banyak ketimpangan dan hal ini yang mendasari munculnya kekerasan. Sedangkan kekerasan kultural disebabkan oleh nilai-nilai yang ada dalam individu oknum HMI. Kader HMI yang memiliki latarbelakang konflik dapat berpengaruh terhadap perilaku vandalisme dan tindakan kekerasan yang dilakukannya.

Vandalisme dan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh HMI ada yang sifatnya spontan dan terencana. Sifatnya spontan apabila tidak ada perencanaan terlebih dahulu akan melakukan vandalisme dan tindakan kekerasan. Perilaku vandalisme dan tindakan kekerasan terjadi secara spontan yang disebabkan oleh berbagai hal salah satunya terkait dengan cara pemerintah merespon gerakan HMI. Apabila hal ini terjadi maka bentuk vandalisme dan tindakan kekerasan yang dilakukan dengan memanfaatkan apa saja yang ada disekitar yang dapat dijadikan alat untuk berbuat vandalisme dan tindakan kekerasan. Alat yang dapat dimanfaatkan dapat berupa batu, bambu, kayu, spanduk dan lain yang menunjang perbuatan vandalisme dan

²⁶ Galtung, Studi Perdamaian: Perdamaian dan konflik, Pembangunan dan Peradaban, (Surabaya:Pustaka Eureka,2003),hal.69.

tindakan kekerasan.

Sedangkan sifatnya terencana yaitu adanya persiapan yang dilakukan oleh oknum-oknum HMI untuk melakukan vandalisme dan tindakan kekerasan. Mereka sengaja membawa alat yang dapat dipergunakan untuk melakukan vandalisme dan tindakan kekerasan. Alat yang dapat dipersiapkan diantaranya menyiapkan senjata tajam, panah, batu, bambu, cat maupun alat tulis untuk melakukan pencoretan, korek api, bensin, spanduk dan lain sebagainya.

Vandalisme yang umumnya dilakukan oleh HMI diantaranya: Bakar ban, membakar spanduk, merusak tanaman, merusak pagar, merusak kendaraan pengguna jalan, merusak fasilitas publik, menghancurkan kaca, mencoret tembok sedangkan tindakan kekerasannya yaitu bentrok fisik dengan aparat, melempar batu, memukul aparat dengan bambu, menggunakan senjata tajam, memanah petugas, memblokir jalan, membajak mobil tangki Pertamina.

Perilaku vandalisme yang dilakukan oleh oknum HMI dapat dimasukkan ke dalam beberapa pengelompokan vandalisme yang

dikatakan oleh Lase (2003)²⁷ yang antara lain:

1. Aksi mencorat-coret (graffiti)

Aksi mencorat-coret graffiti seperti tembok pinggir jalan, tembok sekolah, jembatan, halte bus, bangunan, telepon umum, wc umum, dan sebagainya.

2. Aksi Merusak (destroying)

Aksi merusak penataan lingkungan yang sudah tersusun rapi dari orang lain.

Penanganan Aparat Pemerintah Terhadap Gerakan Massa

Gerakan aksi mahasiswa tidak dapat dipisahkan dari peran aparat keamanan dalam hal ini kepolisian yang bertugas untuk menjaga keamanan dari sebuah aksi demonstrasi. Demonstrasi dalam rangka menyampaikan pendapat dilindungi oleh undang-undang sehingga tugas aparat keamanan yang menjaga sebuah aksi agar tidak berubah menjadi aksi yang dapat mengancam keamanan.

Peran polisi melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dan fungsinya menjalankan hukum

²⁷ Lase, J, Pengaruh Lingkungan Keluarga dan Sekolah Terhadap Vandalisme Siswa, (Jakarta: Program Pasca Sarjana FKIP Universitas Indonesia, 2003), hal.40.

yang ada. Polisi di dalam menjaga keamanan sebuah aksi massa memiliki prosedur tetap yang menjadi panduan bagi polisi dalam menangani aksi-aksi massa. Panduan penanganan ini diatur dalam Prosedur tetap kepolisian Negara Republik Indonesia dengan nomor: Protap/1/X/2010.²⁸

Apabila kita melihat lagi protap polisi dalam menangani sebuah aksi massa dapat dikatakan sudah sesuai dengan yang diharapkan. Namun yang menjadi kendala yaitu pelaksanaannya dilapangan yang tidak selalu dapat dilaksanakan sesuai prosedur karena aksi dilapangan itu sifatnya sangat tidak stabil dan cenderung selalu berubah. Tidak semua juga aparat keamanan membaca dan mengetahui secara rinci tentang Protap yang dilakukan dalam menangani massa aksi.

Sebuah aksi dapat berakhir dengan kerusakan dikarenakan aparat kemanan tidak semuanya dilatih tentang bagaimana cara-cara dalam menghadapi aksi massa. Tidak semua aparat kemanan memiliki kemampuan berbicara dan bernegosiasi padahal di dalam sebuah aksi kemampuan

negosiasi sangat berguna di dalam mengendalikan aksi massa. Selain itu dalam pengamanan aksi massa umumnya dilakukan oleh polisi-polisi muda sehingga mudah emosional dan tersulut emosinya dengan perilaku dan tindakan massa aksi dan hal ini tentu sangat berbahaya dan dapat menimbulkan aksi massa berujung pada vandalisme dan tindakan kekerasan.

KESIMPULAN

Vandalisme dan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum HMI bertentangan dengan tujuan, asas, independensi serta sistem perkaderan HMI dan karena itu dapat dikatakan bahwa vandalisme dan tindakan kekerasan bukan nilai-nilai yang diajarkan HMI.

Vandalisme dan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum HMI berdampak pada stigma negatif yang diterima HMI. Stigma negatif ini dipengaruhi oleh peran media yang tidak netral dalam pemberitaan terkait kegiatan HMI dan yang diberitakan cenderung hal-hal buruk.

Dalam upaya mengurangi vandalisme dan tindakan kekerasan, organisasi selalu menawarkan inovasi-

²⁸ Prosedur tetap kepolisian negara Republik Indonesia dengan nomor : Protap/1/X/2010.

inovasi baru terkait teknis gerakan dan salah satunya gerakan dengan memanfaatkan media sehingga aksi turun ke jalan dapat dikurangi yang berdampak pada berkurangnya potensi terjadinya vandalisme dan tindakan kekerasan. Upaya yang lain yang dilakukan yaitu melakukan pembinaan terhadap kader.

Dalam organisasi terdapat mekanisme dalam menindak setiap perilaku menyimpang kader namun tidak secara spesifik menyatakan bentuk- bentuk perilaku menyimpang tersebut serta tidak ada sanksi yang jelas bagi perilaku menyimpang kadernya dan hal ini berdasmpak pada tetap adanya vandalisme dan tindakan kekerasan dalam gerakan HMI yang dilakukan oknum HMI.

Vandalisme dan tindakan kekerasan muncul disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

- a. Budaya masing-masing Cabang
- b. Proses Kaderisasi yang belum selesai
- c. Faktor Individu
- d. Faktor Lingkungan
- e. Respon Pemerintah terhadap gerakan HMI

Terdapat dua sifat vandalisme dan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum HMI yaitu yang bersifat

spontan dan yang bersifat terencana. Spontan apabila tidak ada perencanaan terlebih dahulu. Kondisi lapangan yang dinamis berdampak pada vandalisme dan tindakan kekerasan yang dilakukan oknum HMI. Terencana apabila terdapat persiapan awal yang dilakukan oleh oknum-oknum HMI. Oknum HMI melakukan persiapan awal untuk melakukan vandalisme dan tindakan kekerasan.

Vandalisme yang umumnya dilakukan oleh HMI diantaranya: Bakar ban, membakar spanduk, merusak tanaman, merusak pagar, merusak kendaraan pengguna jalan, merusak fasilitas publik, menghancurkan kaca, mencoret tembok sedangkan tindakan kekerasannya yaitu bentrok fisik dengan aparat, melempar batu, memukul aparat dengan bambu, menggunakan senjata tajam, memanah petugas, memblokir jalan, membajak mobil tangki Pertamina.

Aparat keamanan dalam menghadapi gerakan massa berpegang kepada Prosedur tetap kepolisian negara Republik Indonesia dengan nomor : Protap/1/X/2010. Penanganan massa yang tidak sesuai dapat berakibat kepada munculnya vandalisme dan tindakan kekerasan.

Cara aparat keamanan dalam merespon gerakan massa sangat berpengaruh terhadap jalannya aksi massa secara tertib. Yang menjadi kendala yaitu aparat keamanan tidak semuanya mengetahui dan mengerti cara penanganan aksi massa yang baik dan benar. Terkadang dalam pengamanan aparat yang bertugas di lapangan adalah petugas muda yang minim pengalaman dan muda emosional sehingga berpengaruh terhadap munculnya vandalisme dan tindakan kekerasan.

Saran

Saran Teoritis

1. Penelitian ini dilakukan dengan mewawancarai narasumber secara terpisah. Dalam penelitian ini antara posisi pemerintah dan HMI tidak dipertemukan sehingga pandangan yang muncul didasarkan pada pandangnya masing-masing. Diperlukan suatu bentuk pertemuan yang mempertemukan semua pihak yang terlibat dalam upaya mengatasi secara netral fenomena ini tanpa mementingkan ego masing-masing pihak.
2. Fokus lokasi penelitian ini adalah Pengurus Besar HMI. HMI memiliki

cabang yang tersebar dari sabang sampai merauke. Menarik untuk melakukan penelitian perbandingan antara cabang-cabang yang ada karena setiap cabang antara satu dengan yang lainnya memiliki budaya yang berbeda-beda walaupun di bawah naungan organisasi yang sama.

Saran Praktis

1. Kebebasan menyampaikan pendapat diatur di dalam undang-undang. Oleh karena itu sudah secepatnya pemerintah lebih mempedulikan dan merespon dengan baik setiap aksi-aksi yang dilakukan oleh HMI. Respon pemerintah berpengaruh terhadap munculnya vandalisme dan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh HMI.
2. Aparat keamanan dalam menghadapi aksi massa umumnya terdiri dari polisi-polisi muda yang minim pengalaman dan muda emosional. Seharusnya dalam menghadapi aksi dari mahasiswa aparat keamanan yang bertugas menjaga aksi adalah polisi yang sudah berpengalaman dan lebih tua dibanding peserta aksi sehingga dapat meredam vandalisme dan tindakan

kekerasan yang dilakukan oleh HMI

3. Di dalam HMI terdapat perkaderan yang sifatnya informal. Perkaderan informal tidak terlalu diatur sebagaimana perkaderan yang sifatnya formal. Di dalam perkaderan informal tidak jelas siapa yang berhak mengkader seorang anggota baru dan seperti apa perkaderan yang dilakukan. Munculnya penyimpangan nilai menurut peneliti sangat besar dalam perkaderan informal. Dalam hal ini HMI harus lebih memperhatikan perkaderan yang sifatnya informal ini sehingga potensi untuk melakukan vandalisme dan tindakan kekerasan dapat dikurangi.
4. Perencanaan aksi yang matang harus selalu diutamakan sebelum melakukan aksi sebagai upaya untuk mengurangi vandalisme dan tindakan kekerasan muncul. Dan seluruh peserta aksi harus mengikuti semua rangkaian aksi termasuk mengetahui perencanaan aksi dan teknis di lapangan karena umumnya yang melakukan vandalisme dan tindakan kekerasan merupakan peserta aksi yang tidak mengikuti seluruh rangkaian aksi.

REFERENSI

Buku

- Arikunto, Suharsimi. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Basrowi, Sukidin. (1999). *Teori-Teori Perlawanan Dan Kekerasan Kolektif*. Surabaya: Insan Cendekia.
- Bagong, S, dkk. (2000). *Tindak Kekerasan Mengintai Anak-anak Jatim*. Surabaya: Lutfansah Mediatama.
- Cohen, S. (1973). *Property Destruction: Motives and Meanings*. In C. Word (ed.). *Vandalism*. London: Architectural Press.
- Galtung, J. (2003). *Studi Perdamaian: Perdamaian dan Konflik, Pembangunan dan Peradaban*. Surabaya: Pustaka Eureka.
- Hamidi. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*. Malang: UMM Press.
- Hancock, B., Ockleford, E., & Windridge, K. (2009). *An Introduction to Qualitative Research*. Nottingham. The NIHR RDS for The East Midlands.

Keliat, A.B.N et all. (1998). *Proses Keperawatan Jiwa*. Jakarta: EGC.

Kim, I. & A. Bruchman. (2005). *Juvenile Vandalism & Parents Watch: A New Approach Toward the Eradiction of the Vansalism phenomena*. Beit-Berl College.

Matulessy, A. (2005). *Mahasiswa dan Gerakan Sosial*. Yogyakarta: Srikandi.

Miles, M. B., Huberman, A. M., dan Saldana. J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebooks*. Arizona: SAGE Publications.

Sitompul,A. (1995). *Historiografi Himpunan Mahasiswa Islam tahun 1947-1993*. Jakarta: Intermasa.

Susanto, Astrid S. (1980). *Komunikasi Massa*. Jakarta: Binacipta

Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.

Sujarweni, V dan Wiratna. (2014). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Tanja, V. (1982). *HMI sejarah dan Kedudukannya di Tengah-Tengah Gerakan-gerakan Muslim Pembaharu di Indonesia*.

Jakarta: Sinar Harapan.

Tesis

Lase, J. (2003). *Pengaruh Lingkungan Keluarga dan Sekolah Terhadap Vandalisme Siswa*. Jakarta: Program Pasca Sarjana FKIP Universitas Indonesia.

Peraturan Perundangan

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 27 Ayat (3).

Prosedur tetap kepolisian negara Republik Indonesia dengan nomor: Protap/1/X/2010.

Dokumen

Hasil-Hasil Kongres HMI XXIX di Pekanbaru pada tanggal 22 November- 5 Desember 2013